

BAB II

SEJARAH AWAL MULA KONFLIK YANG TERJADI ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN

2.1 Awal Kedudukan Jepang di Semenanjung Korea

Letaknya di wilayah Asia Timur, membuat Jepang sangat mudah untuk melakukan invasi ke negara-negara Asia lainnya. Salah satu dari negara-negara tersebut adalah Tiongkok dan Semenanjung Korea. Semangat Jepang untuk melakukan invasi ke beberapa negara di Asia Tenggara, Tiongkok dan Korea timbul seiring dengan masuknya ilmu pengetahuan dari Barat. Negara-negara yang menjadi sasaran invasi oleh Jepang merupakan negara-negara yang tertinggal secara teknologi, membuat Jepang lebih mudah untuk melakukan invasi terhadap negara-negara tersebut.

Alasan Jepang melakukan invasi ke negara-negara lain adalah untuk pembangunan beberapa sektor industri dalam upaya modernisasi perekonomian. Banyaknya pembangunan dan sumber daya alam di Jepang tidak mencukupi kebutuhan pembangunan tersebut. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk melakukan invasi terhadap negara lain. Tindakan tersebut menyerupai kolonialisme negara barat. Toyotomi Hideyoshi adalah seorang *daimyo* pada zaman sipil atau *Sengoku* di Jepang. Hideyoshi dilahirkan dari keluarga petani, yang kemudian melayani Oda Nobunaga hingga akhirnya ia menjadi jenderal di pasukan Nobunaga, dan setelah wafatnya Nobunaga di Honno-ji, Hideyoshi mengambil alih kekuasaan dari Nobunaga.

Dengan latar belakang untuk melakukan invasi, Hideyoshi mengeluarkan perintah untuk melakukan invasi militer besar-besaran ke Semenanjung Korea pada tahun 1592-1593. Pasukan yang turut dalam serangan itu dipimpin oleh Kato Kiyomasa, Konishi Yukinaga dan Kuroda Nagamasu. Didalam serangan awal ini, banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana. Kekuatan laut Jepang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Jepang gagal memasuki perairan Korea sehingga menyulitkan Jepang untuk merebut Joseon (Seoul) dan Pyeongyang. Meskipun demikian, invasi militer tersebut gagal. Akhirnya militer Kekaisaran Jepang

melakukan invasi kedua terhadap Semenanjung Korea pada tahun 1594-1604 yang dilakukan sebagai pembalasan terhadap kegagalan invasi pertama. Invasi kedua tersebut dikenal sebagai invasi Hideyoshi ke Korea. Pertempuran tujuh tahun (masa berlangsungnya) yang dikenal juga sebagai pertempuran Imjin Pihak Korea dibantu oleh dinasti Ming (Tiongkok) mampu menaklukkan serangan-serangan Jepang (<http://kerajaan-kuru.arjuna.web.id/>).

Perjanjian Jepang dengan Korea pada 1905, yang dikenal dengan nama perjanjian Eulsa atau Perjanjian Protektorat Jepang dan Korea, adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Kekaisaran Jepang dan Kekaisaran Korea pada tahun 1905. Dalam perjanjian ini Jepang mencabut kedaulatan Korea dan mengubah Korea menjadi wilayah protektorat Jepang. Hirobumi Ito dan sekutunya memasuki Balai Jungmyeongjeon, yaitu sebuah ruangan yang dirancang oleh Rusia yang pernah menjadi bagian dari Istana Deoksu, dengan tujuan untuk meminta persetujuan dari Raja Gojong untuk menyetujui perjanjian Eulsa, tetapi Raja Gojong menolak. Hirobumi Ito lalu menekan kabinet Korea untuk menandatangani perjanjian ini. Kabinet Korea pada akhirnya menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh kekaisaran Jepang. Raja Gojong mengubah gelarnya menjadi Kaisar Gwangmu yang merupakan kepala kekaisaran yang memiliki kekuatan penuh dalam mengatur kedaulatan kekaisaran Korea tanpa ketergantungan atas dinasti Qing. Dalam tahun-tahun sebelumnya, Joseon hidup dalam ketergantungan dinasti Qing dan berkewajiban harus mengirim upeti kepada Kaisar Qing (Clare:1910).

Setelah perjanjian Eulsa Jepang mengajukan Traktat Jepang Korea pada 1910, yang juga dikenal dengan nama Traktat Aneksasi Jepang dan Korea, adalah perjanjian yang ditandatangani Kekaisaran Jepang dan Korea pada 22 Agustus 1910. Dalam perjanjian ini, Korea secara resmi menjadi bagian dari Korea setelah Traktat Jepang Korea pada tahun 1905 yang membuat Korea menjadi protektorat Jepang dan Traktat Jepang Korea pada tahun 1907 yang mencabut wewenang Korea dalam administrasi urusan dalam negeri. Selain itu Jepang mengeluarkan kebijakan resmi asimilasi yang melarang pendidikan bahasa Korea di sekolah-sekolah yang ada di Korea. Pemerintah Jepang juga melarang

masyarakat Korea untuk menggunakan bahasa Korea asli yakni *hangeul* dalam melakukan komunikasi mereka sehari-sehari. Hal ini dilakukan Jepang untuk mendoktrin masyarakat Korea agar mereka mengikuti kebudayaan Jepang dan berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang (Hook, Glen D 2001:491).

Selain itu selama melakukan invasi di Semenanjung Korea, tentara Jepang mempekerjakan wanita Korea secara paksa untuk menjadi pekerja seks para tentara militer Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah *Jugun Ianfu* yakni istilah yang digunakan pemerintah kolonial Jepang saat Perang Dunia II untuk menyebut wanita-wanita penghibur yang diperuntukan bagi para tentaranya. Menurut keterangan dari *House of Sharing*, diperkirakan terdapat lebih dari 200.000 wanita dari berbagai wilayah kolonial Jepang dan yang paling banyak berasal dari Korea. Para korban wanita dipaksa melakukan perbudakan seksual oleh militer Jepang. Para korban wanita penghibur yang kebanyakan remaja dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Mereka diperkosa oleh 20 sampai 40 tentara setiap harinya (<https://kumparan.com/>).

Pada saat itu, kegiatan menyediakan wanita untuk keperluan pemenuhan kebutuhan seks tentara Jepang sendiri diperbolehkan dan disahkan oleh undang-undang yang disebut *Kosho Sedo* atau pelacuran umum. Selain *Kosho Sedo*, dikenal juga pelacuran khusus yang berisi wanita penghibur khusus untuk mendukung semangat perang antara Jepang. Pelacuran khusus dibuat dengan tujuan yang sama dengan pelacuran umum, namun bersifat lebih terbatas untuk menghindari terjangkitnya penyakit kelamin (Tahiro, 2003:119). Namun, masyarakat Korea tidak tinggal diam. Pergerakan pada 1 Maret 1919, merupakan puncak dari kemarahan masyarakat Korea dan mengakibatkan para pemimpin Korea harus melarikan diri ke Cina

Gerakan 1 Maret 1919 atau dikenal juga dengan sebutan ***March 1st Independence Movement*** ini menjadi titik awal dalam perjuangan Korea untuk kemerdekaan dari pemerintah kolonial Jepang. Meskipun demonstrasi nasional ini gagal mencapai tujuan untuk mempengaruhi kemerdekaan, mereka menyatukan orang-orang Korea dalam semangat ketika mereka menunggu pembebasan dari Jepang. Karena keganasan pasukan militer Jepang pergerakan aksi tersebut

menghabisi 7.509 korban tewas, 15.850 korban luka-luka, 45.306 korban ditangkap dan sebanyak 715 rumah, 47 gereja serta 2 sekolah dibakar oleh militer Jepang. Di Cina, aktivis kemerdekaan Korea menjalin hubungan dengan Pemerintah Nasional Republik Tiongkok yang mendukung Pemerintahan Sementara Republik Korea, sebagai pemerintah di pengasingan. Pada saat yang sama, Tentara Pembebasan Korea, yang beroperasi di bawah Dewan Militer Nasional China dan pemerintahan sementara Republik Korea, memimpin serangan terhadap Jepang. Demonstrasi tersebut memaksa Jepang untuk melonggarkan peraturan-peraturan mereka pada masyarakat Korea (<https://mediaindonesia.com/>).

Perlawanan masyarakat Korea pada saat itu gagal. Namun pada saat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke wilayah Hiroshima dan Nagasaki, pada saat itu pula Korea dalam titik terang dan Korea Selatan dapat merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan berakhirnya perang pada bulan Agustus 1945, masih belum ada mufakat yang jelas mengenai nasib Korea di antara pemimpin Sekutu.

Jenderal Nobuyuki Abe merupakan Jenderal Jepang di Korea yang terakhir, telah memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah masyarakat Korea yang berpengaruh sejak awal Agustus 1945 untuk mempersiapkan peralihan kekuasaan. Pada 15 Agustus 1945, Lyuh Woon-Hyung, yang merupakan politisi sayap kiri moderat, setuju untuk mengambil alih pemerintahan Korea. Lyuh Woon-Hyung bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah negara baru dan bekerja keras untuk membangun struktur pemerintahan. Pada 6 September 1945, wakil-wakil kongres bersidang di Seoul. Penyusunan dasar negara Korea modern berlangsung hanya tiga minggu setelah Jepang menyerah. Pemerintah Korea didominasi oleh sayap kiri, yang sebagian dari pengikutnya banyak pejuang anti penjajahan yang setuju dengan pandangan komunisme mengenai imperialisme dan kolonialisme.

Pelacuran di Jepang sudah ada sejak zaman Edo yang dipimpin oleh Shogun Tokugawa. Pelacuran atau prostitusi di Jepang memiliki sejarah yang Panjang. Pada tahun 1617, Shogun Tokugawa mengeluarkan perintah yang membatasi prostitusi di daerah-daerah tertentu saja yang berlokasi di pinggir

kota. Tiga wilayah yang paling terkenal adalah Yoshiwara, Shinmachi, dan Shimabara. Para wanita penghibur diberikan gelar *yujo* atau “*Women of Pleasure*” dan diberikan tingkatan berdasarkan Hierarki para pekerja seksual (Jurnal:Sejarah Prostitusi Jepang dimuat dalam <https://ms4857.wordpress.com>).

Selanjutnya ketika Jepang membuka kembali negaranya terhadap negara Barat setelah sekian lama menutup dari pengaruh negara asing dan masuknya pengaruh Barat. Prostitusi-prostitusi yang tidak memiliki izin mulai berdatangan dan menimbulkan masalah baru bagi penduduk setempat dan aparat keamanan. Para *karayuki san* kebanyakan berasal dari keluarga petani dan nelayan. Pada masa itu jumlah pengangguran semakin meningkat akibat dari Restorasi Meiji. Seiring dengan itu, angka kelahiran juga meningkat. Pada 1873 populasi penduduk Jepang berjumlah sekitar 35,2 juta. Pada tahun 1935 populasinya berlipat ganda, yaitu menjadi 69,3 juta. Oleh karena itu, pabrik-pabrik tidak mampu menampung ledakan penduduk ini dan untuk bertani pun sulit karena harga sewa tanah pertanian juga semakin mahal. Penduduk Jepang pun dilanda kemiskinan. Untuk mempertahankan hidup sebagian dari mereka meninggalkan Jepang. Keluarga petani dan nelayan merelakan anak-anak mereka untuk bekerja di luar negeri. Agen tenaga kerja menjamin bahwa bahwa anak-anak gadis mereka akan mendapatkan pekerjaan disana. Mediator yang mengatur keberangkatan mereka mencari gadis-gadis dari para keluarga petani dan nelayan yang miskin dan membayar sejumlah uang kepada orangtua mereka, dan mengatakan bahwa anak-anak gadis mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja sosial di negara lain. Yang mana pada kenyataannya mereka menjual kembali gadis-gadis tersebut ke industri prostitusi untuk mendapatkan keuntungan (<https://theglobal-review.com/karayuki-san/>).

Gambar 2.1
***Jugun Ianfu* pada saat Perang Dunia II**



(sumber: www.dailymail.co.uk)

Jumlah *karayuki san* terus bertambah setelah restorasi Meiji. Seiring berjalannya waktu istilah *karayuki san* perlahan menghilang sejak adanya istilah *Jugun Ianfu*. *Jugun Ianfu* (徒軍慰安婦) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada para wanita yang telah menjadi korban perbudakan seks selama Perang Dunia II pada masa koloni Jepang. Para *Jugun Ianfu* ini dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual para tentara Jepang di negara-negara jajahan Jepang. *Jugun Ianfu* dan *karayuki san* sama-sama perempuan yang berasal dari daerah jajahan. *Karayuki san* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari *Jugun Ianfu*. Perempuan dari wilayah jajahan adalah memiliki kedudukan yang rendah, karena mereka melayani tentara dari kalangan yang rendah dan menengah. Mereka diharuskan melayani para tentara baik dari prajurit hingga perwira. Selain itu mereka tidak memiliki hak untuk memilih pria mana yang ingin mereka layani (Liastiyanti,2008:16).

Pada awal mula tercipta kemajuan ekonomi yang berarti bagi masyarakat Korea, dimana semua penduduk yang harusnya ikut menikmatinya, tetapi rakyat Korea menderita kelaparan dan memulai menjual anak-anak gadisnya untuk dijadikan *Jugun Ianfu* untuk menyambung kehidupannya. Tetapi pada akhirnya negara Korea tetap miskin karena bahan-bahan mineral dan batu bara sudah habis disedot sebelumnya oleh Jepang. Semua itu adalah upaya Jepang menjadikan rakyat Korea sengsara, sama halnya pada saat Jepang

menjajah Indonesia. Perempuan Korea yang awalnya digunakan oleh Jepang sebagai *Jugun Ianfu* disebut *Choseijin* (Kurahashi,1994:50).

Di wilayah Korea terdapat badan keanggotaan perempuan-perempuan yang secara sukarela mengabdikan diri mereka dalam perang. Seharusnya mereka dipekerjakan di pabrik membuat barang-barang keperluan militer, namun pada kenyataannya sering kali disalah gunakan menjadi suatu tindakan prostitusi (Hicks,1997:52)

Dengan ditemukannya dokumen-dokumen dan mulai terkuaknya kejahatan militer Jepang dalam kasus *Jugun Ianfu* ini, peristiwa tersebut telah mengundang perhatian dunia, karena itu, Jepang dituntut untuk memberikan kompensasi kepada para mantan *Jugun Ianfu* yang terdapat di berbagai negara di Asia. Respon Jepang pada saat itu tepatnya pada tahun 1995 mengumumkan berdirinya *Asia Women's Fund* untuk mengumpulkan dana dari masyarakat Jepang kemudian diberikan kepada para mantan *Jugun Ianfu*.

Ternyata kebijakan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh beberapa negara salah satunya Korea. Sebab yang dituntut oleh para mantan *Jugun Ianfu* untuk memberikan kompensasi adalah pemerintah Jepang, bukan masyarakat Jepang. Berdasarkan yang terlihat bagaimana sikap pemerintah Jepang yang ingin menutupi kejahatan para penguasa pendahulunya, sekaligus pemerintah Jepang ingin menghindari pengeluaran dana dari kas negara. Dengan sikap pemerintah Jepang ini benar-benar tidak menunjukkan sikap suportifnya bahkan, memperlihatkan sikap yang tidak mau bertanggung jawab serta melecehkan martabat wanita mantan *Jugun Ianfu* (Tahiro,2003:124).

2.2 Ketegangan Antara Jepang dan Korea Selatan

2.2.1 Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan

Pulau Dokdo adalah sebuah pulau karang yang terletak perairan laut Jepang. Korea Selatan memberi nama pulau tersebut dengan nama “Dokdo” yang artinya pulau karang. Sedangkan Jepang memberi nama pulau tersebut dengan nama “Takeshima” yang artinya pulau bambu. Pulau Dokdo atau dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Liancourt Rocks* yang merupakan sengketa telah muncul sejak akhir Perang Dunia II. Saat Jepang membuat pernyataan bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini memancing kemarahan masyarakat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka (Jurnal: *War's Legacy Plagues Japan and Its Neighbors*, dimuat dalam www.nation.time.com).

Gambar 2.2.1. Peta Pulau Dokdo/Takeshima

(sumber: <https://beritadunia.net/>)



Pada tahun 1996 Jepang dan Korea Selatan sama-sama mendeklarasikan batas Zona Ekonomi Eksklusif di laut Jepang. Perairan laut Jepang adalah perairan laut yang tidak begitu luas, maka delimitasi maritimnya dilakukan berdasarkan perundingan bilateral untuk menetapkan batas zona maritim Jepang dan Korea Selatan di laut Jepang. Perundingan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif di laut Jepang yang dilaksanakan pada tahun 1996 telah memunculkan kembali permasalahan sengketa Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan secara bersamaan mengklaim bahwa Pulau Dokdo

merupakan wilayah teritorial mereka. Jepang dan Korea Selatan juga menetapkan Pulau Dokdo sebagai titik pangkal dalam menetapkan zona maritimnya di laut Jepang. Karena adanya saling klaim dalam kepemilikan pulau Dokdo, sengketa Pulau Dokdo ini menjadi penghambat dalam membuat perjanjian delimitasi maritim di laut Jepang. Jepang dan Korea Selatan mengklaim kepemilikan Pulau Dokdo berdasarkan geografis. Kedua negara ini sama-sama memiliki bukti yang menguatkan klaimnya atas kepemilikan Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan memiliki hubungan yang kelim pada masa Perang Dunia II dan harus menghadapi kenyataan semakin memburuknya hubungan tersebut saat sengketa Pulau Dokdo kembali mencuat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, namun belum mencapai suatu penyelesaian terhadap sengketa pulau Dokdo tersebut. Belum tercapainya mufakat mengenai batas wilayah antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan di wilayah tersebut. Selain itu, sengketa ini juga menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang (Jurnal: *War's Legacy Plagues Japan and Its Neighbors*, dimuat dalam www.nation.time.com).

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan Dunia (UNFAO), pada tahun 2009 Jepang yang memiliki teknologi perkapalan modern yang canggih, Jepang berhasil menangkap lebih dari 4 juta ton ikan per tahun dan hasil laut lainnya. Sedangkan Korea Selatan, meski teknologi perkapalan tidak secanggih Jepang, tetapi Korea Selatan masih mampu menangkap 3 juta ton ikan per tahun dan hasil laut lainnya dari perairan pulau Dokdo. Pulau Dokdo juga menyimpan potensi pariwisata yang menjanjikan bagi pendapatan negara Jepang dan Korea Selatan (<http://en.dokdo.go.kr/pages/main/>).

Korea Selatan dan Jepang bertemu kembali dalam perundingan Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Mengenai Perjanjian Perikanan antara Jepang dan Korea Selatan, negosiasi dasar yang dilakukan kedua negara tersebut untuk menjadikan Pulau Dokdo sebagai titik pangkal maritim. Namun, negosiasi dasar ini berubah pada tahun 2006 saat Korea Selatan mengeluarkan deklarasi yang menyatakan sebelumnya pada tahun 1998, Jepang dan Korea Selatan telah

menyepakati Perjanjian Perikanan 1998 (*The Fisheries Agreement*) di Laut Jepang. Sebenarnya Perjanjian Perikanan ini merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Belum adanya batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan menyebabkan terhambatnya kedua negara ini untuk mendapatkan hasil laut yang melimpah dari Laut Jepang. Oleh Karena itu, Jepang dan Korea Selatan menetapkan zona perikanan eksklusif 35 mil dari laut untuk masing-masing negara, dimana kedua negara ini berhak untuk menangkap ikan dalam jumlah tertentu yang diatur oleh Komisi Perikanan Gabungan (<http://www.koreaherald.com/>).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menemukan informasi tentang tangkapan ikan dan status stok di wilayah perairan pulau Dokdo. Pada tahun 1985, sebelum perjanjian perikanan Korea dan Jepang tahun 1998 di mana Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menghormati perairan di sekitar wilayah perairan pulau Dokdo secara netral, total produksi ikan sekitar 12 juta ton. Di bawah Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002 dalam Perjanjian Perikanan (*The Fisheries Agreement*), Korea Selatan diizinkan untuk menangkap 149.200 ton ikan sementara Jepang terbatas sebanyak 94.000 ton. Pada Januari 2002, industri perikanan yang sebenarnya mendapatkan output penangkapan ikan Korea sebanyak 149.218 ton, sedangkan Jepang menangkap 93.773 ton. Jika kuota penangkapan ikan dihilangkan akan berdampak buruk bagi hasil laut yang ada. Selain itu, spesies komposisi hasil tangkapan dari perairan Pulau Dokdo telah berubah seiring berjalannya waktu (<https://www.dokdo-takeshima.com/>).

Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali negosiasi untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Negosiasi dimulai pada bulan April 2006, disaat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di laut Jepang. Rencana pemerintah Jepang yang akan melakukan riset ilmiah pada akhirnya menyebabkan ketegang dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang. Mendengar pernyataan Jepang mengenai bahwa Jepang akan melakukan riset ilmiah, membuat Korea Selatan kesal dan Korea Selatan menginginkan membuat kesepakatan dan bernegosiasi dalam hal tersebut, Korea Selatan menginginkan bahwa Jepang

menunda rencana riset ilmiahnya. Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk melakukan riset ilmiah di Laut Jepang mencangkup perairan pulau Dokdo secara bersama-sama. Riset inilah yang kemudian menghasilkan penemuan gas hidrat di Ulleung Tsushima Basin (Jurnal: *War's Legacy Plagues Japan and Its Neighbors*, dimuat dalam www.nation.time.com).

Perebutan pulau Dokdo seakan tidak ada akhirnya. Pada tanggal 14 Maret 2005, Korea Selatan marah atas klaim Jepang terhadap pulau Dokdo. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat Korea Selatan melakukan unjuk rasa di depan kedutaan besar Jepang yang ada di Seoul. Masyarakat Korea Selatan kembali memprotes klaim Jepang atas wilayah perairan Dokdo dan Takeshima yang seharusnya masuk kawasan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan juga dinilai terlalu lemah menghadapi sikap Jepang. Semakin memanasnya sengketa pulau Dokdo setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Toshiyuki Takano mengeluarkan pernyataan kedua kepulauan itu milik Jepang atas dasar historis dan hukum. Karena kemarahan masyarakat Korea Selatan memaksa pemerintah Jepang menarik Duta Besar Jepang Takano pulang ke Tokyo. Pemerintah Korea Selatan menyatakan tidak masalah jika harus mengorbankan hubungan bilateral dengan Jepang demi mempertahankan Kepulauan Dokdo. Pasalnya, kawasan yang berlokasi di antara Korea Selatan dan Jepang itu kaya dengan sumber daya laut (<https://www.liputan6.com/global/>).

Jepang kembali mengeluarkan klaim yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo adalah pulau milik teritorial Jepang pada Buku Putih Pertahanan mereka tahun 2018. Dalam sidang kabinet pada 28 Agustus 2018 Jepang mengadopsi Buku Putih dan menyatakan bahwa masalah teritorial bagian utara Jepang dan Takeshima masih belum dipecahkan. Jepang kemudian mengklaim hak kedaulatan Pulau. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memutuskan untuk memanggil Jenderal Jepang untuk Korea Selatan, Koichi Mizushima, dan melayangkan protes keras atas pengulangan tuntutan kepemilikan Pulau Dokdo (<http://world.kbs.co.kr/>).

2.2.2 Industri Hiburan Korea Selatan di Jepang

Meski dengan ketegangan politik yang terus menerus yang tidak ada hentinya terjadi pada hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang, diplomasi dan kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan masih terus berjalan, termasuk dalam hal budaya. Usaha untuk menyebarkan budaya populer di masing-masing negara terus dilakukan, terutama dalam hal industri hiburan. Di wilayah Asia Timur, Jepang muncul sebagai negara yang terkenal akan Anime (animasi Jepang) dan Manga (komik Jepang). Di lain pihak, Korea Selatan terkenal dengan K-drama (drama Korea) dan juga K-pop (musik pop Korea).

Persebaran industri hiburan Korea yang dilakukan melalui *hallyu* merupakan salah satu fenomena persebaran budaya yang banyak terdengar dewasa ini. Istilah *hallyu* yang secara harfiah diartikan sebagai “Gelombang Korea”, diciptakan oleh media di Cina pada tahun 2001 untuk mendeskripsikan ekspor industri hiburan Korea, seperti drama, musik, dan penyanyi terkenal, yang dimulai sejak tahun 1990 dan tersebar di berbagai negara Asia seperti Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Jepang hingga meluas ke Amerika, Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika Utara (Kim, 2012:553).

Dalam globalisasiannya, *hallyu* mendapat dukungan langsung dari pemerintah Korea Selatan. Contoh dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap *hallyu* dilakukan oleh pemerintah dengan cara seperti menayangkan pameran dagang tahunan ke seluruh penjuru dunia sejak tahun 2001 serta pemberian subsidi terhadap produser program televisi Korea untuk dapat mengembangkan karyanya ke pasar luar negeri (Shim, 2006 dalam Huang, 2011:9). Dengan kuatnya dukungan dari pemerintah, drama dan musik pop Korea (selanjutnya disebut K-pop) yang merupakan bagian dari *hallyu* pun dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia. Girls Generation, Super Junior, Big Bang, PSY, Exo, dan BTS adalah beberapa contoh ikon K-pop yang telah berjasa menyebarkan *hallyu* ke berbagai penjuru dunia.

Dilihat dari besarnya jumlah penyanyi Korea yang memulai debutnya di Jepang, dapat dikatakan bahwa pasar musik di Jepang merupakan salah satu target utama bagi industri hiburan Korea untuk menyebarkan *hallyu*. Hal ini

dilatarbelakangi oleh fakta bahwa industri rekaman dan pasar rekaman Jepang sejak tahun 1999an berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam penjualan tingkat dunia, yang membuat Jepang menjadi industri musik terbesar kedua di dunia. (Kawabata, 1991:328-329 dalam Yano, 2003:46).

Fenomena *hallyu* di Jepang mulai dirasakan sejak penayangan drama Korea, *Winter Sonata* pada tahun 2003 yang membuat popularitas aktor pemeran dari drama tersebut, Bae Yong-Jun, meroket di Jepang. Di tahun yang sama, seorang penyanyi asal Korea, BoA dan sebuah agensi yang sama dengan BoA, Tohoshinki, mulai meraih kesuksesan di Jepang (St. Michel, 2011). Kepopuleran industri hiburan Korea, terutama dalam sektor musik, terus berlanjut dengan meledaknya dua grup K-Pop wanita, KARA dan Girls' Generation di pasaran musik Jepang, dimana KARA berhasil menjual 451.000 album sementara Girls Generation menjual sebanyak 642.000 album pada tahun 2011 (Park, 2012).

Meski dengan keberadaan kelompok penggemar yang cukup banyak di Jepang, globalisasi industri hiburan yang dilakukan oleh Korea tidak selalu menghasilkan perspektif publik yang positif. Hal ini mulai terlihat pada tahun 2011, ketika seorang Aktor Jepang, Sousuke Takaoka, mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap banyaknya program televisi Korea yang ditayangkan di Jepang melalui akun media sosial twitter-nya (CNN, 2011), dan juga mulai muncul gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh massa terhadap *hallyu* di depan gedung stasiun ternama Jepang, stasiun televisi Fuji yang memang banyak menayangkan program Korea.

Reaksi negatif dari publik didasari oleh meningkatnya ketegangan diantara kedua negara pada tahun 2011 dikarenakan isu sengketa Dokdo/Takeshima. Isu ini menimbulkan kekhawatiran pada figur-figur penting dari bisnis hiburan Korea karena akan mempengaruhi para selebritis yang melakukan promosi di Jepang pada tahun tersebut. Hal ini terlihat ketika grup K-Pop KARA memilih untuk tidak memberikan opininya mengenai pulau Dokdo atau Takeshima ketika melakukan promosi di Jepang. Aksi tersebut dilakukan untuk menghindari reaksi yang buruk dari penggemar Jepang mereka, namun

pilihan tersebut sebaliknya malah menimbulkan kecaman dari pihak publik Korea (Jung, 2013).

Isu ini juga mempengaruhi aktor Korea Selatan Song Il-Gook, yang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam acara estafet renang ke pulau Dokdo/Takeshima pada bulan Agustus 2012. Namun, jadwal Song Il-Gook untuk menghadiri acara tersebut dibatalkan oleh pihak Jepang setelah Song Il-Gook membuat sebuah komen di media sosial Twitternya mengenai kemerdekaan republik Korea, yang bertepatan dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Wakil senior di kementerian luar negeri Jepang, Tsuyoshi Yamaguchi mengatakan bahwa akan sulit bagi Song Il-Gook untuk kembali ke Jepang dikarenakan publik memiliki pandangan negatif terhadap Song Il-Gook (McCurry, 2012). Di sini, isu politik seolah ada dalam industri hiburan. Para selebriti yang merupakan aktor utama dalam globalisasi industri hiburan turut dilibatkan dalam ketegangan politik yang terjadi di antara Korea Selatan dan Jepang. Bahkan para selebriti Korea seakan dipaksa untuk menyatakan bahwa Kepulauan Dokdo adalah milik Korea Selatan.

Sentimen dan protes anti-Korea yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan bisnis Korea di Jepang menurun, termasuk bisnis industri hiburan. Seorang promotor film Korea berkata bahwa pada tahun 2012, bisnis sangat sulit untuk dilakukan bagi mereka yang berusaha menjual produk budaya di Jepang. Disaat yang bersamaan, buku-buku anti Korea juga menjadi barang yang laris terjual di toko buku di Jepang, hal yang merefleksikan sentiment anti-Korea di Jepang (Park, 2014).

Meski dengan berbagai protes yang datang dari masyarakat Jepang, dalam sebuah survei berjudul “Seabad permusuhan Anti-Jepang” oleh Korea yang bahkan membuat penggemar *hallyu* bergetar, yang diadakan oleh majalah Josei Seven pada bulan september 2012, tidak seluruh masyarakat Jepang memiliki sentimen negatif terhadap *hallyu*. Dalam survei yang diikuti oleh 100 orang penggemar drama Korea tersebut, ketika ditanyakan mengenai isu Dokdo/Takeshima, 47% responden mengatakan tidak akan mentolerasi aksi yang dilakukan oleh Korea. Tetapi dalam merespon pertanyaan mengenai sentimen

anti-Korea, 71% responden menjawab bahwa mereka tidak punya niatan untuk berhenti menjadi penggemar, dan hanya 10% responden yang menyatakan akan berhenti mengonsumsi industri hiburan Jepang dikarenakan sengketa Dokdo/Takeshima (Tully, 2018).

Dalam hal penggunaan *hallyu* sebagai sebuah instrumen *soft power* diplomasi publik Korea di Jepang, fakta bahwa para selebritis Korea dapat melakukan promosi dan memiliki popularitas tersendiri di Jepang, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa industri musik Korea memiliki kekuatan untuk menginfiltrasi industri hiburan Jepang. Meski dengan berbagai isu yang terjadi, terutama pada tahun 2011-2012, pasar Jepang masih tetap terbuka bagi industri musik Korea hingga saat ini.

2.2.3 Korea Selatan dan Jepang Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2002

Dalam putusan FIFA World Cup yang tidak diduga, dan menjadi perbincangan dari berbagai negara. Yang belum pernah terjadi selama sejarah World Cup selama 66 tahun, dua negara berbagi menjadi tuan rumah pertandingan FIFA World Cup. Dan membuat tindakan Zurich bahwa negara-negara kecil bisa melakukan hal yang sama di masa mendatang. Itu merupakan tamparan langsung pada Presiden FIFA Joao Havelange, yang berusia 80 tahun sebenarnya telah menjanjikan Jepang acara tersebut. Pemungutan suara oleh komite eksekutif FIFA yang beranggotakan 21 orang dapat menandakan dimulainya kejatuhan Havelange, lebih dari dua dekade ia berkuasa. Hasilnya, diumumkan secara tak terduga 24 jam lebih awal dari yang direncanakan, menandai klimaks dari pertempuran yang paling intens dan berat yang pernah diperjuangkan demi hak untuk menggelar Piala Dunia. Keputusan itu segera dikritik, tidak terkecuali oleh Jepang, yang menghabiskan lebih dari \$ 60 juta untuk kampanye mereka dan percaya bahwa mereka adalah pemegang kunci untuk FIFA World Cup 2002. Dan Korea Selatan ingin turnamen itu diselenggarakan sendiri di Korea Selatan, tetapi berakhir menyetujui untuk berbagi dengan Jepang sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2002, tetapi sampai menit terakhir Jepang dan Korea menolak untuk berkompromi. Tetapi pada akhirnya Jepang dan Korea Selatan dapat

berkompromi mengenai pembagian penyelenggaraan FIFA World Cup 2002. Presiden Korea Selatan berpendapat bahwa penyelenggaraan FIFA World Cup 2002 di Korea Selatan dan Jepang akan menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat hubungan persahabatan dua negara tersebut (<https://www.latimes.com/>).

2.2.4 Stasiun Televisi Jepang batalkan penampilan K-pop BTS

Pada akhir Perang Dunia II Agustus 1945 Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan Amerika yang meninggalakan luka mendalam bagi masyarakat Jepang. Pengeboman itu menyebabkan Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II di Asia, dan mengakhiri masa kolonialisme di Semenanjung Korea yang dimulai pada 1910. Televisi Jepang membatalkan penampilan grup K-pop BTS di tengah kontroversi kaus tentang bom atom di Jepang yang digunakan oleh salah seorang anggota grup K-pop Korea Selatan ini. Foto Jimin menggunakan kaus terkait bom atom yang dijatuhkan Amerika di Jepang dengan korban ratusan ribu orang, menyebar cepat di internet. Meski grup K-pop BTS sangat banyak penggemarnya di Jepang, namun penggemar BTS di Jepang beranggapan bahwa langkah Jimin menghina Jepang dan membuat penggemar BTS di Jepang kecewa atas tindakan Jimin tersebut. BTS sendiri meminta maaf kepada para penggemarnya karena tak bisa tampil di TV. Di Jepang, kaus ini dianggap sebagai perayaan jatuhnya bom yang akhirnya membuka jalan kemerdekaan semenanjung Korea dari penjajahan Jepang. Masalah perang merupakan masalah yang sangat sensitif bagi dua negara. BTS, K-pop Korea dengan tujuh anggota, dijadwalkan akan tampil di acara music TV Asahi pada 9 November 2018 namun batal (<https://www.bbc.com/>).